



Efendi

Analis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa sejak Januari sampai Agustus 2025 jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 44.333 orang. Jumlah PHK tertinggi terjadi pada bulan Februari 2025 dengan jumlah mencapai 17.796 orang. PHK terjadi di banyak sektor, antara lain sektor industri tekstil, rumah sakit, perhotelan, hingga media, seperti Kompas TV, CNN Indonesia, dan MNC Group. Tingginya jumlah PHK dikarenakan faktor perlambatan ekonomi nasional dan faktor lainnya.

Peningkatan jumlah PHK menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk segera menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah telah meluncurkan Program Paket Ekonomi Tahun 2025 yang mencakup tujuh belas program utama. Program-program ini dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga ketahanan sosial, serta memperluas kesempatan kerja. Dari jumlah tersebut, lima program secara khusus difokuskan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pertama, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi baru. Hingga akhir Desember 2025, program ini ditargetkan dapat menciptakan 1 juta lapangan kerja. *Kedua*, Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang pada tahun 2025 menyasar pengembangan di 100 desa. Program ini diperkirakan akan menyerap sekitar 8.645 tenaga kerja dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, pengembangan di 4.000 titik kampung nelayan ditargetkan mampu menciptakan hingga 200.000 lapangan kerja. *Ketiga*, Program Revitalisasi Tambak di wilayah Pantai Utara Jawa seluas 20.000 hektare. Program ini ditargetkan mampu menyerap sekitar 168.000 tenaga kerja. *Keempat*, Program Modernisasi Kapal Nelayan, yang menyasar sebanyak 1.000 kapal nelayan dan diproyeksikan menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja baru. *Kelima*, Program Perkebunan Rakyat yang mencakup penanaman kembali (*replanting*) seluas 870.000 hektare oleh Kementerian Pertanian. Program ini diperkirakan akan membuka hingga 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan, dengan komoditas prioritas meliputi tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

Lima program penyerapan tenaga kerja tersebut dinilai sebagai respons terhadap kebutuhan publik dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja yang lebih merata dan berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (*gig worker*). Selain itu, program ini juga merupakan sinyal penting bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada sektor akar rumput dan tidak hanya tertumpu pada industri besar tetapi juga pada kekuatan desa, pesisir dan pertanian rakyat.

Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dapat menghambat keberhasilan program ini. Salah satunya adalah fokus program yang lebih diarahkan kepada masyarakat di wilayah perdesaan dan pesisir, sehingga kurang menjangkau para korban PHK yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Tantangan lainnya mencakup koordinasi antarlembaga yang belum optimal;

adanya potensi permasalahan manajemen anggaran; dan keberlanjutan program. Selain itu, transisi ekonomi menuju digitalisasi dan perlindungan pekerja yang belum sepenuhnya terintegrasi juga menjadi isu penting yang perlu diatasi.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan secara ketat agar program benar-benar memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional. Di samping itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Fondasi tersebut akan semakin kuat apabila didukung oleh tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, dan partisipasi publik yang luas. Sebab, penciptaan lapangan kerja tidak dapat sepenuhnya bergantung pada program pemerintah saja, tetapi juga memerlukan kontribusi aktif dari sektor swasta.

Atensi DPR

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka PHK dan pengangguran adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru melalui Paket Ekonomi Tahun 2025, yang terdiri atas tujuh belas program. Program-program tersebut dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga ketahanan sosial, dan memperluas kesempatan kerja. Dari keseluruhan program tersebut, terdapat lima program yang secara khusus berfokus pada penyerapan tenaga kerja. Terkait dengan lima program penyerapan tenaga kerja tersebut, terdapat sejumlah langkah yang perlu dilakukan oleh Komisi IX DPR RI. Melalui fungsi anggaran, Komisi IX DPR RI perlu memberikan dukungan sekaligus mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kelima program tersebut dengan alokasi anggaran yang memadai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut dan memastikan pemerintah bertanggung jawab agar program penyerapan tenaga kerja benar-benar berkontribusi pada penguatan sektor-sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja.

Sumber

Bisnis Indonesia, 16 September 2025;
detik.com, 16 September 2025;
kompas.com, 16 September 2025;
Kontan, 16 September 2025;
Media Indonesia, 16 September 2025; dan
Rakyat Merdeka, 16 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making